

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2020





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2020

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 yang melanda dunia mampu mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 79.579 NIE, pemeriksaan di 7.406 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 20.564 sampel, penemuan 67 perkara, dan 32 kegiatan KIE.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2020. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 2 September 2020
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Standardisasi	13
III. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan	16
IV. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	16
V. Digitalisasi Pelayanan Publik	21
VI. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	23
VII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana	24
VIII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	28
IX. Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	29
X. Pengelolaan Anggaran	31
XI. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	31
PENUTUP	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2020	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan II Tahun 2020.....	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2020.....	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2020.....	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan II Tahun 2020 ..	7
Gambar 6.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan II Tahun 2020..	7
Gambar 7.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2020	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2020	8
Gambar 9.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2020	9
Gambar 10.	Profil Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan II tahun 2020	9
Gambar 11.	Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Jan - Juni 2020)	10
Gambar 12.	Grafik Pemberian Pelayanan Informasi Kepada Media Periode Januari - Juni 2020	16
Gambar 13.	Persentase Pelaksanaan Wawancara Langsung dan Jawaban Tertulis Kepada Media Periode Januari – Juni 2020	16
Gambar 14.	Total Audience di Media Sosial Badan POM Triwulan II tahun 2020	17
Gambar 15.	Total Engagement Badan POM Triwulan II tahun 2020.....	17
Gambar 16.	Top engagement content pada platform <i>Facebook</i> Triwulan II tahun 2020	18
Gambar 17.	Top engagement content pada platform Instagram Triwulan II tahun 2020.....	18
Gambar 18.	Tren Pemberitaan hingga Triwulan II tahun 2020	19
Gambar 19.	Pemberitaan Berdasarkan jenis media.....	19



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2020

Peluncuran Publikasi di Bidang Obat Untuk Penanggulangan Covid-19



Jakarta / Selasa (07/04/2020)

Berkomitmen untuk menangani pandemi Covid-19, Badan POM menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) dan Peluncuran Publikasi di Bidang Obat untuk Penanggulangan Covid-19 yang dikemas melalui *online conference* dari Badan POM Command Center. FGD diikuti setidaknya 170 orang peserta serta para Tim Ahli dalam *Informatorium Obat COVID-19 di Indonesia*. Badan POM menyadari dibutuhkan informasi obat yang lengkap sebagai acuan bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Oleh karena itu, Badan POM dengan dukungan Tim Ahli dari berbagai latar belakang di bidang kesehatan (klinisi, farmakolog, akademisi, dan lainnya) telah menyusun *Informatorium Obat COVID-19* yang diluncurkan saat ini. *Informatorium* ini berisi informasi terkait perkembangan obat COVID-19 di dunia dan tata laksana pengobatan COVID-19 di Indonesia.

Peran Aktif Badan POM dalam Percepatan Penanganan COVID-19

Jakarta/ Selasa (07/04/2020)

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyerahkan bantuan terkait percepatan penanganan COVID-19 kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di kantor BNPB Jakarta. Bantuan yang diserahkan merupakan hasil penggalangan dari berbagai perusahaan Obat dan Makanan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa obat-obatan, obat herbal, obat topikal, suplemen penambah daya tahan tubuh, vitamin, susu, minuman, dan alat kesehatan (antiseptik, *hand sanitizer*, *hand soap*, *hand gel*, masker serta sarung tangan).



Badan POM gelar KIE Daring tentang “Hidup Sehat dengan Obat dan Makanan Aman di Tengah Pandemi COVID-19”



Jakarta / Jumat (15/05/2020)

Badan POM melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara daring/online di Kantor Badan POM. Acara diikuti 375 orang partisipan yang terdiri dari para Pimpinan Badan POM Pusat, Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di kabupaten/kota, perwakilan asosiasi pelaku usaha di bidang obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, perwakilan asosiasi pelaku usaha di bidang pangan, serta perwakilan organisasi masyarakat umum. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito yang sekaligus memberikan paparan. Kepala Badan POM menyampaikan bahwa di beberapa daerah/provinsi telah diterapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena itu terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat. Yang awalnya melakukan pembelian secara langsung, sekarang lebih banyak membeli produk, termasuk Obat dan Makanan, secara daring/online.

Resmikan Laboratorium Biohazard, Badan POM Siap Percepat Pengujian Spesimen COVID-19

Jakarta / Rabu (20/05/2020)

Badan POM yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus berperan aktif dalam penanggulangan pandemi, termasuk percepatan pengujian spesimen COVID-19. Setelah selesai diperbarui, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito meresmikan gedung Laboratorium Biohazard Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) untuk pengujian spesimen COVID-19 pada Rabu (20/05.). Peresmian dilakukan secara virtual dengan dihadiri oleh berbagai lintas sektor seperti Dr N. Paranietharan *representative World Health Organization (WHO)* di Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar - Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan undangan lainnya.



Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat dan Makanan Online



Jakarta / Kamis (18/06/2020)

Pandemi COVID-19 menuntut setiap orang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satunya berbelanja secara *online* karena lebih banyak di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Merespon hal ini, Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring sebagai upaya penuh perlindungan masyarakat akan akses obat dan makanan yang aman. "Badan POM terus melakukan terobosan dalam mekanisme pengawasan dan pencegahan agar produk obat dan makanan beredar secara daring memenuhi kriteria keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya," jelas Kepala Badan POM dalam Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring di Kantor Badan POM Jakarta.

Ritel Pangan, Ujung Tombak Keamanan Pangan

Jakarta / Kamis (25/06/2020)

World Food Safety Day (WSFD) diperingati tanggal 7 Juni setiap tahunnya. Sebagai rangkaian peringatan WSFD tahun 2020 ini, Badan POM menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengangkat tema "Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Ritel Pangan". FGD yang dikemas dalam bentuk seminar *online/webinar* dan dibuka oleh Kepala Badan POM ini dihadiri Ketua Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia Roy A. Sparringa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Y. Joko Setiyanto, serta perwakilan dari pelaku usaha dan stakeholder terkait. "Ritel pangan menjadi ujung tombak keamanan pangan, sebelum produk pangan tersebut diperoleh dan dikonsumsi masyarakat.





BADAN POM

**HASIL KEGIATAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN**

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2020

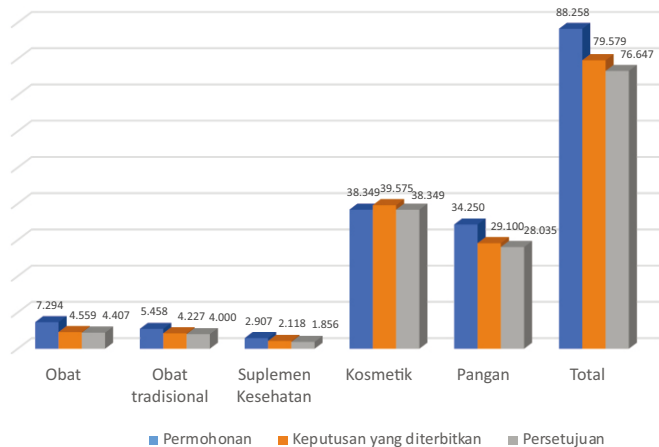
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

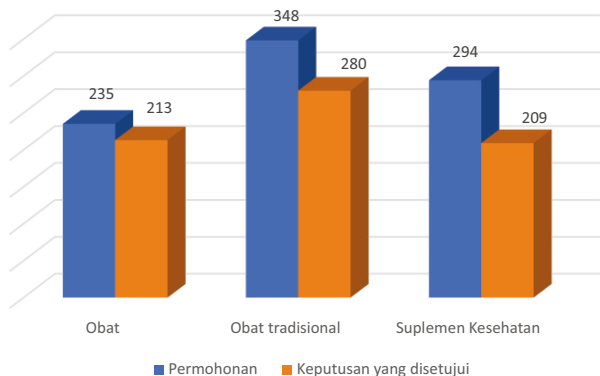
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, telah diterbitkan **79.579** keputusan dan **76.647** persetujuan izin edar dari **88.258** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2020



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan II Tahun 2020



Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, dari 877 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 702 (80,05 %) iklan.**

Pengawasan *post-market*

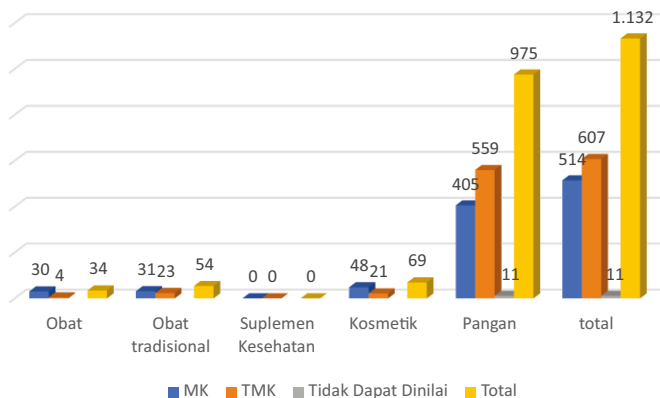
Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

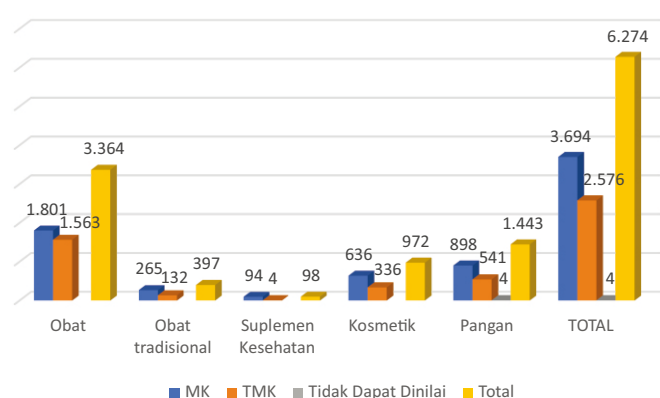
B POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2020 telah diperiksa sebanyak **1.132 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **607 (53,62%)** sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2020

Sampai dengan Triwulan II tahun 2020 telah diperiksa **6.274 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **2.576 (41,06%)** sarana adalah TMK.



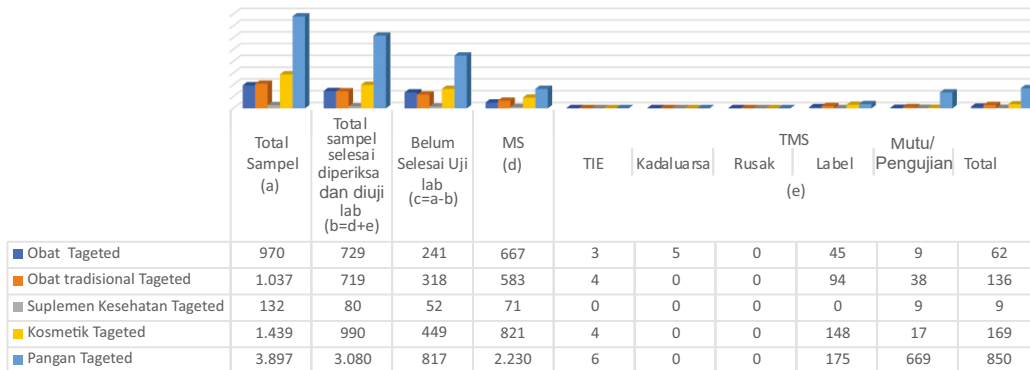
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2020

Keterangan:

MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi



A. Targeted

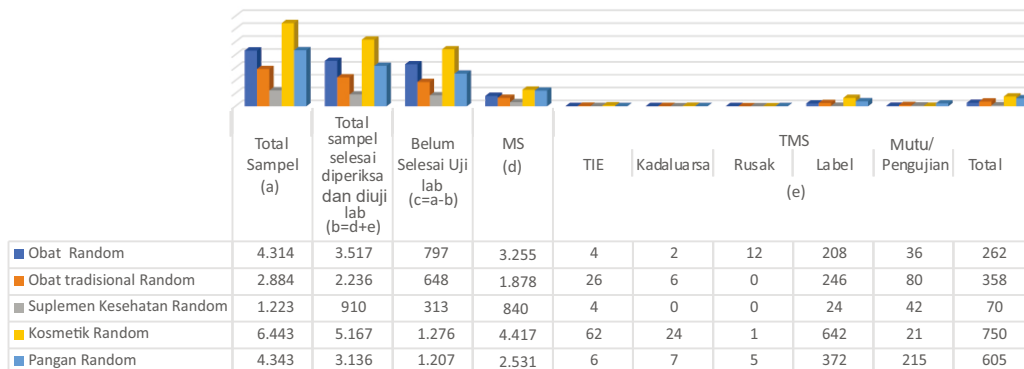


Sampai dengan **Triwulan II tahun 2020**, dari **7.475 sampel targeted** yang disampling terdapat 5.598 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **4.372 (78,10%)** sampel memenuhi syarat.

Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan II tahun 2020

B. Random / Acak

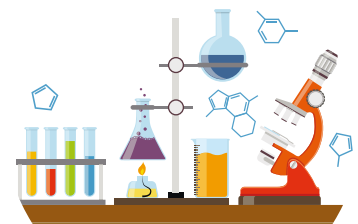


Sampai dengan **Triwulan II tahun 2020**, dari **19.207 sampel random** yang disampling terdapat 14.966 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **12.921 (86,34%)** sampel memenuhi syarat.

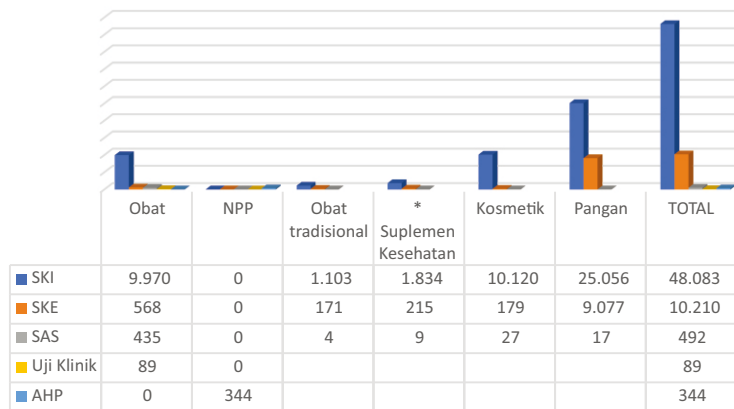
Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa Izin Edar

Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan II tahun 2020

* Sumber data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)



Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan II tahun 2020** telah diterbitkan **48.083 SKI, 10.210 SKE, 492 SAS, 89 Uji Klinik, dan 344 AHP** Obat dan Makanan.

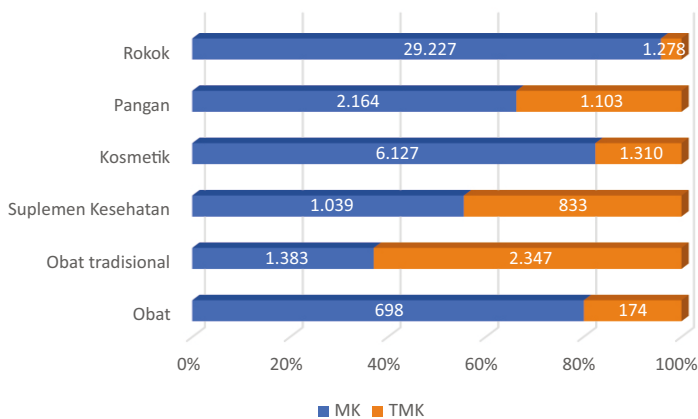


* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2020

Pengawasan Iklan

4



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, dari 47.683 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 40.638 (85,22%) iklan memenuhi ketentuan.**

Gambar 8. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2020

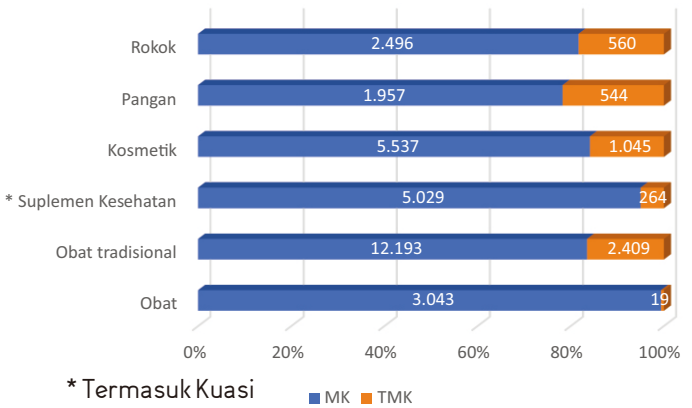


BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, dari 35.096 label Obat dan Makanan yang diawasi, 30.255 atau sekitar**

86,21% label memenuhi ketentuan.

5

Pengawasan Label



Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan II tahun 2020

6

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- ⊙ MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- ⊙ MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.



Kategori	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakanjutt	Persentase
Obat	3.687	2.725	73,90%
Obat Tradisional	52	52	100%
Suplemen Kesehatan	8	8	100%
Kosmetik	359	199	55,43%

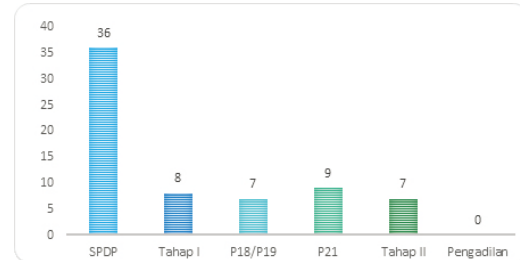
Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan II tahun 2020



Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

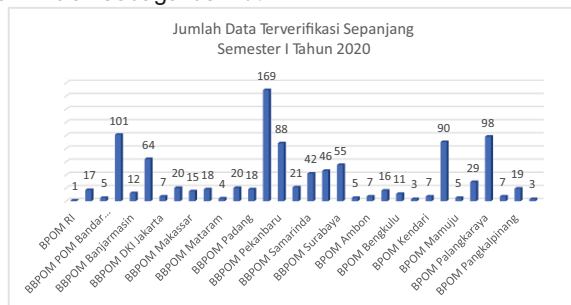
Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 67 perkara. Dari 67 perkara tersebut, 36 perkara masih dalam tahap SPDP, 8 perkara pada tahap 1, 7 perkara pada tahap P18/19, 9 perkara pada tahap P21, 7 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2), Belum ada perkara yang sudah mendapatkan putusan pengadilan.



Gambar 11. Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Jan - Juni 2020)

Peta Rawan Kasus

Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, BPOM menyusun peta berbasis aplikasi yang menggambarkan potensi atau kerawanan kasus Obat dan Makanan di setiap wilayah Indonesia berdasarkan data hasil pengawasan dan penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, hasil pemberian bantuan pengujian sampel dan/atau keterangan ahli kepada Penyidik Polri, hasil tukar menukar informasi dengan lintas sektor terkait, dan hasil monitoring terhadap isu-isu adanya wilayah rawan kasus obat dan makanan di seluruh Indonesia. Nilai data yang dihasilkan peta rawan kasus bersifat aktual dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya pada bidang penindakan agar lebih valid, terarah, dan terukur. Peta rawan kasus ini dapat diakses melalui URL: www.penindakan.pom.go.id. Adapun data yang telah dilakukan verifikasi sepanjang Semester I Tahun 2020 (1 Januari 2020 s.d 30 Juni 2020) adalah sebanyak 1.023 data dengan rincian sebagai berikut:

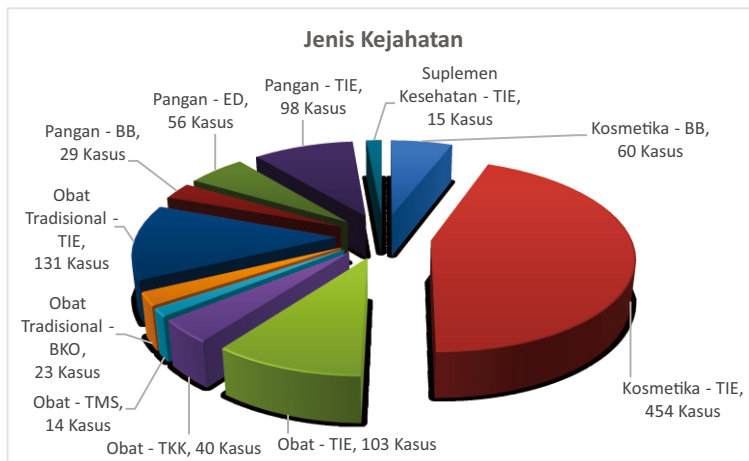


Peta Rawan Kasus Skala Nasional Semester I Tahun 2020

Peta rawan kasus skala nasional ditampilkan dalam bentuk zonasi berdasarkan komoditi yang dominan pada masing-masing provinsi dengan legend warna yang digunakan adalah Merah (Obat), Hijau (Obat Tradisional), Kuning (Kosmetika), Biru (Pangan Olahan), dan Cokelat (Suplemen Kesehatan). Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat pada tingkat provinsi wilayah kerawanan didominasi oleh komoditi kosmetika, dengan rincian kerawanan wilayah untuk tiap komoditi sebagai berikut:

- a. Obat
Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
- b. Obat Tradisional
N/A.
- c. Kosmetika
Aceh, Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.
- d. Pangan Olahan
Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
- e. Suplemen Kesehatan
N/A.

Selain data kerawanan wilayah, pada peta rawan kasus juga dapat diperoleh data kasus dan potensi kerawanan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

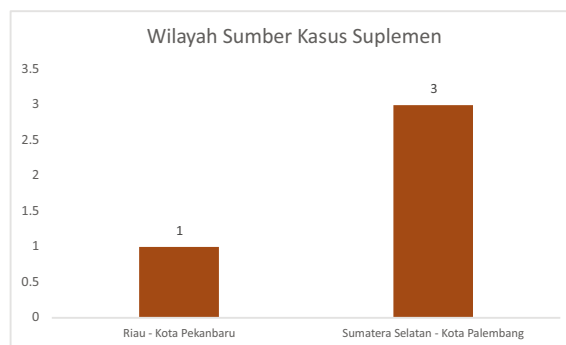
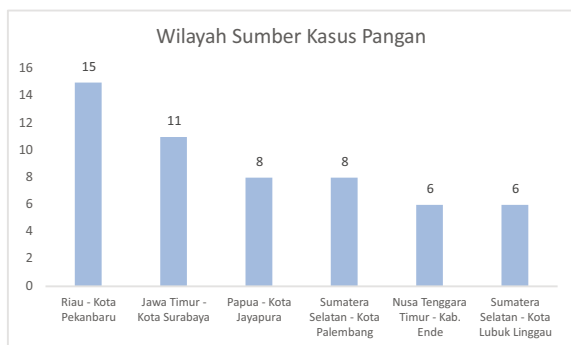
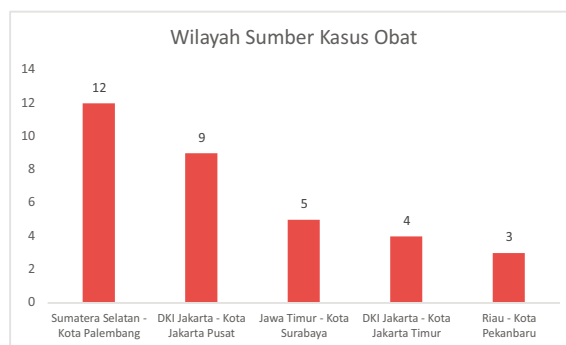
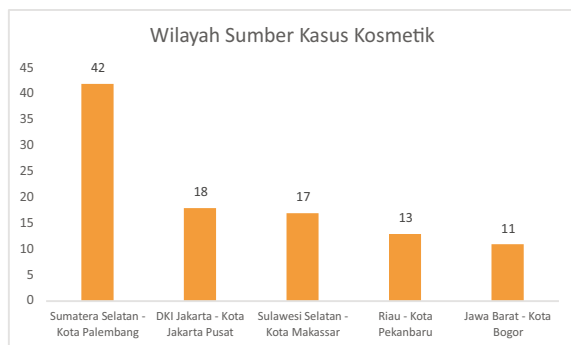


Data Jenis Kejahatan dan Kasus Semester I Tahun 2020

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa data kasus yang mendominasi sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah kasus kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar) sebanyak 454 kasus, diikuti oleh Obat Tradisional TIE (131 kasus), Obat TIE (103 kasus), dan Pangan TIE (98 kasus). Data ini sesuai dengan data kerawanan wilayah yang ditampilkan pada Gambar 1 dimana kosmetika merupakan komoditi yang mendominasi wilayah kerawanan pada skala nasional.

Data lain yang dapat tergambar dari peta rawan kasus adalah wilayah yang teridentifikasi sebagai sumber bagi wilayah lainnya per masing-masing komoditi. Data ini bisa dijadikan sebagai basis data wilayah yang dijadikan sumber dalam melakukan penindakan dan/atau pengawasan di lapangan. Berikut wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah sumber:

10 BESAR WILAYAH SUMBER	
Wilayah Sumber	Jumlah
Sumatera Selatan	88
DKI Jakarta	56
Riau	46
Jawa Timur	43
Jawa Barat	43
Jawa Tengah	29
Sulawesi Selatan	27
Nusa Tenggara Timur	19
Sumatera Utara	18
Bali	16



Grafik Wilayah Sumber Per Komoditi

II. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



Obat

Telah disusun 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat yang masih dalam progres. Berikut 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat tersebut:

1. Revisi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat (71,43%).
2. Revisi Peraturan BPOM No.33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan (71,43%).
3. Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB (100%).
4. Revisi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (14,29%).
5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).
6. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.3682 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi (22,22%).
7. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011 tentang Penerapan Farmakovigilans Bagi Industri Farmasi (22,22%).
8. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Klinis (11,11%).
9. Penyusunan Standar Obat Non Kompensial (85,71%).
10. Penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (Revisi) (70%).
11. Penyusunan Standar Mutu Produk Biologi (Revisi) (33,33%).
12. Informatorium Obat COVID-19 di Indonesia (100%).



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yang masih dalam progres. Berikut 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman tersebut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo) (80%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Persyaratan Teknis CPOTB (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor Hk.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis CPOTB) (80%).
3. Pedoman Uji Klinik Obat Herbal (90%).
4. Rancangan Peraturan badan POM tentang Pola Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (60%).
5. Pedoman Clustering Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (60%).
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) (80%).
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Klaim Kosmetika (40%).

Telah disusun 49 (empat puluh sembilan) kajian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan yang selesai 100%, yaitu:

1. Kajian tentang Produk Baru Minyak Sacha Inchi.
2. Kajian tentang Rasionalitas Komposisi dan Klaim Produk Merit Fiber.
3. Kajian tentang Bahan Baku Obat Tradisional: Jahe Hitam (*Black Ginger*).
4. Kajian tentang Bahan Aktif *Aphanizomenon Flos-aquae Extract*.
5. Kajian tentang Penggunaan Bahan Tambahan.
6. Kajian tentang Tanaman Bajakah berdasarkan hasil penelitian Litbangkes.
7. Kajian Temuan Produk TMS Kadar Metanol N-CHLO PT. Prakasita Sekarmataram.
8. Kajian tentang sirih merah (*Piper crocatum*).
9. Kajian tentang Bahan Baku Baru: Jahe Hitam (*Black Ginger*).
10. Kajian tentang Produk HemoHIM.
11. Kajian tentang Bahan Baku Baru Minyak Biji Carapa guaianensis.
12. Kajian tentang Produk Inamac.
13. Kajian tentang Echinaceae.
14. Kajian tentang Curcumin pada Infeksi Virus Corona.
15. Kajian tentang klasifikasi registrasi (Yeast Extract).
16. Kajian tentang serbuk simplisia tertentu dalam kapsul/tablet.
17. Kajian tentang Bentuk Sediaan Produk Korean Red Ginseng Slice.
18. Kajian tentang Mutu Produk Jadi mencakup Spesifikasi Kadar Air pada sediaan kapsul lunak.
19. Kajian tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional Produk Noluka.
20. Kajian tentang produk MEBO ointment.
21. Kajian tentang Pencantuman Logo Dermatologist Tested pada Sleek Telon Oil.
22. Kajian tentang herbal China untuk Infeksi Virus Corona Produk Lianhua Qingwen Capsules.
23. Kajian tentang Penggunaan Serbuk Bawang Putih dalam Tablet Obat Tradisional.
24. Kajian tentang Pengajuan Uji Klinik Rose-V yang Mengandung Lebih dari 5 Bahan Aktif.
25. Kajian tentang Produk Kena Patch.
26. Kajian tentang TCM Jinhua Qinggan.
27. Kajian tentang Memotide Tablet ex Korea.
28. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Baru Fulvic Acid sebagai Suplemen Kesehatan.
29. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Kombinasi Baru: Ekstrak Kering Prunus mume dan Choline Bitartrate sebagai Produk Suplemen Kesehatan.
30. Kajian tentang Keamanan Penggunaan Dibasic Calcium Phosphate Dihidrate dalam Suplemen Kesehatan.
31. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Aktif Baru Caralluma fimbriata pada Produk Suplemen Kesehatan.
32. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Tambahan Baru L-Lysine Hydrochloride sebagai Cross Linking Inhibitor dalam Suplemen Kesehatan.
33. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Aktif Baru Dextrin pada Produk Suplemen Kesehatan dari PT.Erela.
34. Kajian tentang Pendaftaran Bahan Tambahan Baru Copaiba Oil (*Copaifera reticulata*).

35. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Bahan Baku Copper Sulfate Pentahydrate.
36. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Easpray Coating Powder.
37. Kajian tentang Tambahan Data Klaim dan Dosis Tetra SOD Suplemen Kesehatan.
38. Kajian tentang Kombinasi Baru Suplemen Kesehatan Mengandung Glutathione dan Pine Bark Extract.
39. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Penyesuaian Kadar Maksimum Vitamin D.
40. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Oryza Sakura ekstrak sebagai Komposisi Baru dalam Produk Suplemen Kesehatan.
41. Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Produk Suplemen Kesehatan dengan Kombinasi Baru mengandung Caralluma fimbriata, Hovenia Dulcis, BCAA.
42. Kajian tentang Keamanan, Kemanfaatan, dan Mutu Produk Koasi Indonesia Resens.
43. Kajian tentang Keamanan, Kemanfaatan, dan Mutu Produk Baru Wecoverly sebagai Suplemen Kesehatan.
44. Kajian tentang Evaluasi Kajian Produk Goldfit pada Suplemen Kesehatan untuk Menjaga Kesehatan Sendi.
45. Kajian tentang Keamanan, Kemanfaatan dan Mutu Standardisasi Sakura Collagen Powder .
46. Kajian tentang Daun Sembung (Blumea balsamifera Folium) sebagai Bahan Kosmetika dalam Produk Rempah Mandi .
47. Kajian tentang Daun Legundi (Vitex trifolia Folium) sebagai Bahan Kosmetika dalam Produk Rempah Mandi.
48. Kajian tentang Keamanan Bahan Colloidal Silver dalam sediaan Mouthwash.
49. Kajian tentang Sediaan Padat (Stik) untuk Industri Kosmetika Golongan B.



Pangan

Telah disusun 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman pangan olahan, yang masih dalam progres. Berikut 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman tersebut:

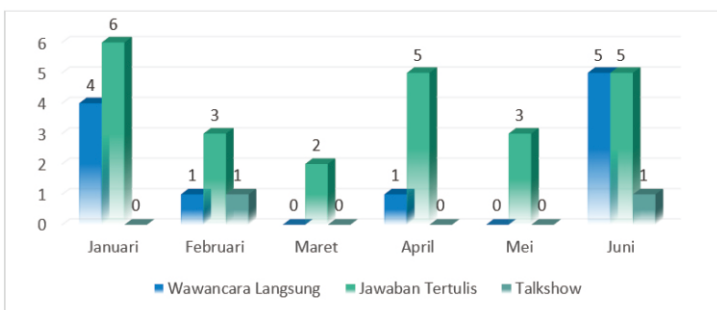
1. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (70%).
2. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi pada Pangan Olahan (50%).
3. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pangan Steril Komersial (Pangan Berasam Rendah) (50%).
4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Label dan Iklan Pangan Olahan (30%).
5. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai gizi pada Label Pangan Olahan (untuk ING UMK dan takaran saji kurang dari ½ saji atau berat bersih kecil) (50%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (70%).
7. Pedoman Pelabelan Pangan : Umum (70%).
8. Pedoman Bahan Baku (70%).
9. Pedoman Akriamida (70%).
10. Pedoman Implementasi Peraturan Kemasan Pangan (70%).

III. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

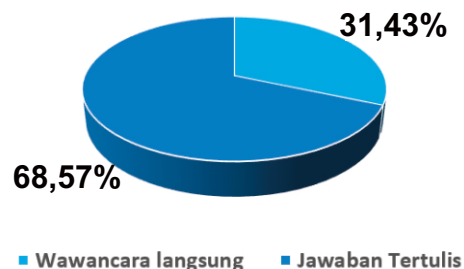
Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2020 terdapat 7 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM antara lain:

1. Kajian Peredaran Obat-Obatan yang sering disalahgunakan (42%).
2. Pengukuran IKU BPOM 2020 (50%).
3. Kajian Keamanan Pangan (INARAC) (36%).
4. Survey Persepsi Lintas Sektor terhadap Program Keamanan Pangan Nasional (35%).
5. Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Proses Registrasi Pangan Olahan (47%).
6. Kajian Peningkatan Efektifitas Implementasi CPOTB bertahap oleh UMKM OT (50%).
7. Kajian Implementasi Inpres no.3 tahun 2017 dalam pengawasan Obat dan Makanan (43%).

IV. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat



Gambar 12. Grafik Pemberian Pelayanan Informasi Kepada Media Periode Januari - Juni 2020

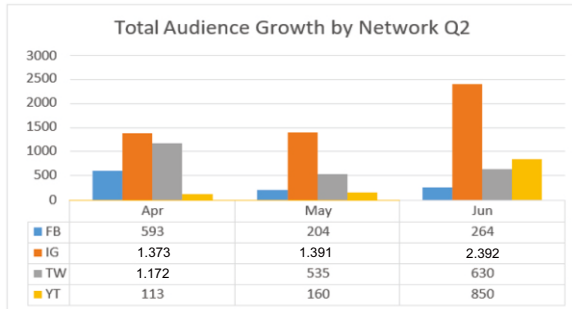


Gambar 13. Persentase Pelaksanaan Wawancara Langsung dan Jawaban Tertulis Kepada Media Periode Januari – Juni 2020

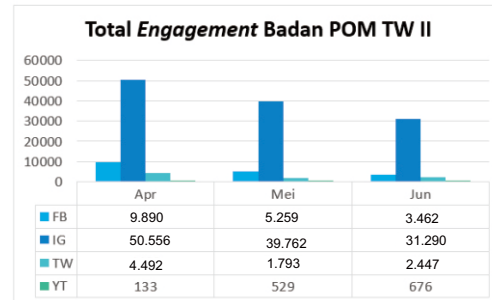
Hingga triwulan II tahun 2020, Badan POM telah menerbitkan 25 (dua puluh lima) siaran pers dan 11 (sebelas) penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu obat dan makanan. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.

Badan POM telah melakukan 37 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media, dengan rincian 35 (tiga puluh lima) kali wawancara pimpinan Badan POM dengan media dan 2 (dua) kali *talkshow* atas permintaan media. Sebagian besar permohonan wawancara dari media atau sebesar 68,57% ditindaklanjuti melalui jawaban tertulis. Hal ini mengingat adanya kondisi pandemi COVID-19 selama periode Maret hingga Juni, sehingga menyebabkan sebagian besar aktivitas kerja pegawai Badan POM dilakukan dengan sistem *Work From Home* (WFH). Selain itu, pemberian jawaban secara tertulis juga dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas waktu penyampaian jawaban kepada media dan meminimalisir kendala penjadwalan pelaksanaan wawancara.

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui *website* resmi Badan POM dan disebarakan kepada media massa. Tercatat 83 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM selama periode triwulan II tahun 2020. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan sebanyak 111 (seratus sebelas) kegiatan, baik yang terselenggara di dalam kantor, dalam kota maupun di luar kota. Terkait publikasi pada triwulan II tahun 2020, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan *Youtube* mencapai 1.216 *post*. Platform *Twitter* adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 721 *tweets* dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah *Facebook* sebanyak 237 *post*, menyusul *Instagram* dengan 234 *post*, serta *Youtube* sebanyak 24 video.

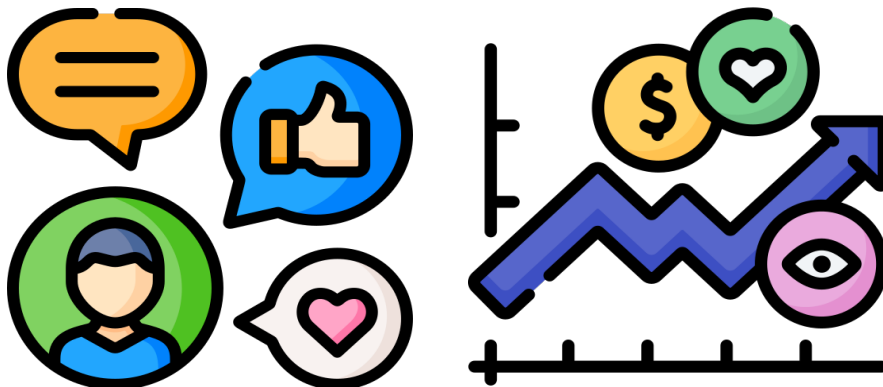


Gambar 14. Total Audience di Media Sosial Badan POM Triwulan II tahun 2020



Gambar 15. Total Engagement Badan POM Triwulan II tahun 2020

Sementara itu, pertumbuhan *audience* pada triwulan II terhadap 4 platform media sosial mengalami kenaikan yang cenderung stabil. *Instagram* merupakan platform dengan total *audience* tertinggi di triwulan II ini dengan jumlah *audience* sebanyak 5.156, sementara di peringkat kedua ada platform *Twitter* dengan jumlah *audience* sebanyak 2.337. Diikuti oleh platform *Youtube* dengan jumlah 1.123 *audience* dan terakhir adalah platform *Facebook* dengan 1.061 *audience*. Pada triwulan II, *engagement* pada setiap platform mengalami penurunan. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan April, dengan total 65.071, diikuti bulan Mei sebesar 47.343, dan Juni sebesar 37.879. Dari ketiga platform, hanya *engagement* platform *Youtube* yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama pada bulan Mei.





Gambar 16. Top engagement content pada platform Facebook Triwulan II tahun 2020



Gambar 17. Top engagement content pada Instagram Triwulan II tahun 2020

Top engagement content pada platform Facebook di triwulan II ini terdapat pada konten Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Upaya Percepatan Penanganan COVID-19. Konten ini mendapat 550 engaged user dengan likes 67 dan share 38. Sementara untuk platform Instagram, top engagement content terdapat pada konten infografis Minum 8 Gelas Air Sehari Saat Puasa dengan likes sebanyak 1.640, comments sebanyak 17, share sebanyak 466 kali dan disimpan sebanyak 620. Sehingga total engagement untuk konten ini adalah sebanyak 2.743.

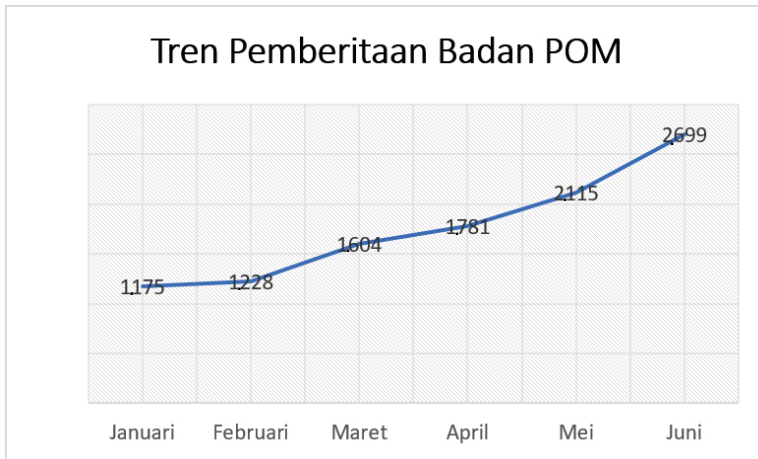
Untuk platform Youtube, konten yang paling banyak dilihat adalah konten Peresmian BioHazard Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Badan POM RI yang mencapai 780 views. Terkait monitoring pemberitaan Badan POM, hingga triwulan II tahun 2020 terdapat sebanyak 10.602 pemberitaan terkait Badan POM. Pemberitaan tersebut terdiri dari pemberitaan secara umum terkait obat dan makanan dan juga terkait Badan POM secara khusus, dengan distribusi sentimen berita yang didominasi oleh tonalitas netral, yaitu sebanyak 6.594 berita (62,20%), diikuti pemberitaan bertonasi positif sebanyak 3.981 berita (37,55%) dan 27 berita (0,25%) bertonasi negatif.

Dilihat dari tonasi pemberitaan terkait Badan POM, pemberitaan didominasi oleh pemberitaan netral dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan POM dipandang sudah cukup baik, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana rincian berikut:

Jumlah Pemberitaan hingga Triwulan II tahun 2020

Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	341	832	2	1.175
Februari	557	662	9	1.228
Maret	399	1.202	3	1.604
April	747	1.032	2	1.781
Mei	890	1.217	8	2.115
Juni	1.047	1.649	3	2.699

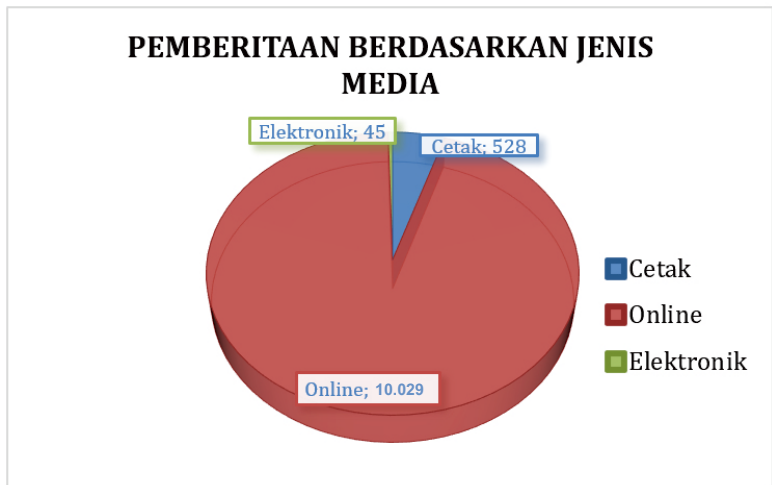




Gambar 18. Tren Pemberitaan hingga Triwulan II tahun 2020

Dari Januari hingga Juni 2020, pemberitaan terkait Badan POM cenderung menunjukkan tren kenaikan setiap bulannya. Puncaknya terjadi pada bulan Juni dengan total 2.699 pemberitaan terkait Badan POM. Jika melihat mundur 3 bulan ke belakang, tren kenaikan tersebut terjadi ketika pandemi COVID-19 mulai terjadi. Ini menunjukkan jika pemberitaan tentang Badan POM menjadi salah satu yang dicari masyarakat terutama terkait penanganan COVID-19.

Berdasarkan jenis mediana, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media *online*, yaitu sebanyak 10.029 berita (94,60%), selanjutnya diikuti 528 berita (4,98%) melalui media cetak dan 45 berita (0,42%) melalui media elektronik.



Gambar 19. Pemberitaan Berdasarkan jenis media



Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2020



Semester 1

1
Mobil HaloBPOM

29 Januari
Mobil HaloBPOM di Sekolah
Alam Cikeas

1
Pameran

18 Februari
Pameran pada Open House HUT
Badan POM

2
Subsite
ulpk.pom.go.id
ppid.pom.go.id

Mei
KIE melalui infografis dan QnA
pada ulpk.pom.go.id,
Penyebaran informasi publik
melalui ppid.pom.go.id

4
Media Elektronik
(TV, Radio, online,
vlog, sms blast)

Januari
Lomba Vlog dengan tema:
"Yuk Jadi Generasi Cerdas Tangkal
Hoaks Obat dan Makanan."
Mei
SMS blast tentang Klorokuin
April
SMS blast tentang Obat, Pangan,
Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan
Mei
SMS blast tentang Idul Fitri

3
Penyuluhan langsung
ke masyarakat

29 Januari
KIE di Sekolah Alam Cikeas
29 Mei
KIE Obat dan Makanan
secara daring dengan tema
"Hidup Sehat dengan Obat dan
Makanan Aman di Tengah
Pandemi Covid-19"
5 Juni
DISKUSI KITA - The New Normal:
Adaptation of Covid-19

1
Sarana Transportasi
(Commuter Line, bis
jemputan, KA jarak
jauh, taksi online)

Mei
KIE melalui bis jemputan
materi Cek KLIK dan Ayo Buang
Sampah Obat

6
Pengelolaan Media Sosial
PPID (Twitter)

Januari-Juni
penyebaran informasi publik
melalui twitter @PPIDBadanPOM

3
Media cetak
(booklet, komik cetak,
bahan promosi, materi
informasi)

Januari
Leaflet Cek KLIK dan HaloBPOM,
Booklet Transformasi Herbal
Mei
Buku Edukasi "Serba Covid,
Cegah COVID-19 Sehat Untuk
Semua"

1
Video dan Konten Kreatif
KIE (Video, Animasi, Komik
Digital)

Mei
Video Animasi "Hidup Sehat,
Cegah COVID-19"

6
Pengelolaan Media
Sosial (Instagram, Twitter,
Fan Page, Youtube)
BPOM Official

Januari-Juni
KIE di media sosial official
Badan POM

2
Penayangan di Videotron
dan EKIOSK

April
Rambu-rambu Physical Distancing
Masker untuk Semua
Langkah Aman Pengolahan Jamu
Mei
Ayo Cek KLIK Sebelum Belanja

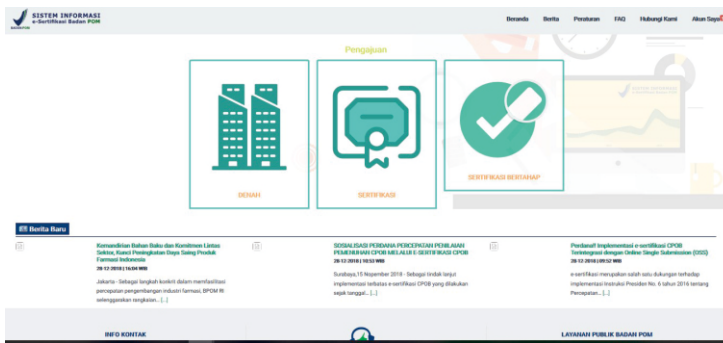


Jumlah Total Kegiatan:

32

V. Digitalisasi Pelayanan Publik

a. E-Sertifikasi Pelayanan BPOM



Aplikasi ini memuat seluruh layanan pengajuan GMP (CPOB, CPOTB, CPPOB, dan CPKB), yang telah terintegrasi dengan OSS. Pada Tahun 2020 ini dilakukan pengembangan kembali dengan berfokus pada pembuatan modul sertifikasi fasilitas bersama untuk industri farmasi dan pembuatan modul rekomendasi registrasi obat impor berdasarkan inspeksi. Selain itu, output aplikasi e-sertifikasi dapat dilakukan *approval* melalui TTE (Tanda Tangan Elektronik) dari BSrn, sehingga sertifikat perizinan tidak menggunakan cap basah.

b. Integrasi Sistem Aplikasi Pelayanan Publik BPOM dengan OSS BKPM

No	Detail Perizinan	Tanggal Dibikin	Keterangan	Status Izin
1	Nomor Revisi: - Tanggal Revisi: - Tanggal Expired: - Nama Pejabat: TEST KEPALA BADAN Nip Pejabat: 1234567890 Jabatan: KEPALA BADAN	2020-07-02 15:54:38.8681905	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Disiak
2	Nomor Revisi: - Tanggal Revisi: 2020-07-02 00:00:00 Tanggal Expired: - Nama Pejabat: TEST BPOM Nip Pejabat: 1234567890 Jabatan: -	2020-07-02 15:54:32.8686986	Akan dilakukan CAPA	Konfirmasi Pembayaran
3	Nomor Revisi: - Tanggal Revisi: 2020-07-02 00:00:00 Tanggal Expired: - Nama Pejabat: TEST BPOM Nip Pejabat: 1234567890 Jabatan: -	2020-07-02 15:54:32.306367	Inspeksi	Inspeksi
4	Nomor Revisi: - Tanggal Revisi: 2020-07-02 00:00:00 Tanggal Expired: - Nama Pejabat: TEST BPOM Nip Pejabat: 1234567890 Jabatan: -	2020-07-02 15:54:31.80491	NTPN 1234567890	Konfirmasi Pembayaran
5	Nomor Revisi: - Tanggal Revisi: 2020-07-02 00:00:00 Tanggal Expired: - Nama Pejabat: TEST BPOM Nip Pejabat: 1234567890 Jabatan: -	2020-07-02 15:54:31.507211	Billing 1234567890	Verifikasi Pembayaran

Berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, BPOM berupaya melakukan integrasi seluruh perizinan yang berada dalam pengawasan BPOM dengan OSS (*Online Single Submission*) yang dikelola oleh BKPM. Sejak tahun 2018, sistem aplikasi pelayanan publik BPOM secara massif melakukan integrasi dengan OSS. Pada tahun 2020, setiap pelaku usaha yang akan melakukan perizinan di BPOM wajib menggunakan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan OSS sebagai identitas pengenal di setiap sistem aplikasi pelayanan publik. Saat ini BPOM telah berhasil mengirim data perizinan ke OSS, agar setiap SLA perizinan dapat termonitor pada dashboard OSS di BKPM.



c. Perkuatan Operasional Backoffice Contact Center



Melalui *Contact Center* Halo BPOM 1500533, masyarakat dapat melaporkan maupun meminta informasi terkait Obat dan Makanan. Petugas Badan POM merespon dan memberikan informasi melalui aplikasi *Contact Center* Halo BPOM 1500533. Pemeliharaan terhadap sistem *Contact Center* Halo BPOM 1500533 dilakukan secara rutin setiap bulannya, sudah dilakukan cek fisik dari bulan Januari-Juni 2020, selain itu pada TW II telah dilakukan *Update* sistem pada aplikasi Halo BPOM menjadi lebih *user friendly*.

VI. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, telah ditetapkan 11 (sebelas) Peraturan Badan POM, 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Kepala Badan POM, 60 (enam puluh) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang:
Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

2 Judul RPP



Rancangan Peraturan Pemerintah:
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

11 Judul Peraturan Badan POM



Peraturan Badan POM :

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika.
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat Dan Makanan Terpadu.
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan BPOM
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik.
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi Dan Makanan.
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring.
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2020 Tentang Manajemen Kinerja ASN dilingkungan Badan POM.
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tahun 2020 Tentang Registrasi Suplemen Kesehatan.

VII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Penataan Organisasi Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden RI periode tahun 2019-2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi BPOM meliputi penyetaraan jabatan administrasi dan penyederhanaan struktur organisasi. Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, BPOM telah melakukan pemetaan jabatan administrasi Eselon III (administrator) dan eselon IV (pengawas) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan jabatan yang tidak dialihkan ke jabatan fungsional. BPOM telah melakukan pembahasan penyederhanaan struktur organisasi dengan internal BPOM dan dilanjutkan pembahasan dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. Penyederhanaan struktur organisasi BPOM disosialisasikan secara daring kepada seluruh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPOM, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar, Balai, dan Loka POM, serta Kepala Balai di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tanggal 26 Juni 2020.



Sosialisasi Penyederhanaan Struktur Organisasi BPOM tanggal 26 Juni 2020

Berdasarkan hasil penyederhanaan birokrasi BPOM, terdapat 83,31% pejabat administrasi yang dilakukan penyetaraan dan pengalihan ke dalam jabatan fungsional terdiri atas 80,10% jabatan administrator (eselon III) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan 84,77% jabatan pengawas (eselon IV) yang dialihkan ke jabatan fungsional. Rekapitulasi penyederhanaan birokrasi BPOM sebagai berikut:

Rekapitulasi Penyetaraan Jabatan di Lingkungan BPOM

No	Jabatan Struktural	Struktur Organisasi Existing	Struktur Organisasi Baru Yang Dipertahankan	Pejabat Administrasi Dialihkan ke Fungsional
1	Administrator (Eselon III)	201	40 (19,90%)	161 JF Ahli Madya (80,10%)
2	Pengawas (Eselon IV)	440	67 (15,23%)	373 JF Ahli Muda (84,77%)
Total		641	107 (16,69%)	534 (83,31%)

BPOM telah menyampaikan hasil evaluasi dan penataan organisasi BPOM kepada Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM tanggal 3 Januari 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM, yang memuat usulan penataan organisasi dan tata kerja BPOM sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, meliputi Unit Kerja BPOM Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar, Balai, dan Loka POM, serta UPT di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (akan mencabut Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM).
2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM.
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (akan mencabut Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM).
4. Rancangan Peraturan BPOM tentang Uraian Fungsi Organisasi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
5. Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM (akan mencabut Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019).
6. Rancangan Peraturan BPOM tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan BPOM.

Dari keenam Rancangan Peraturan BPOM tersebut, BPOM telah menyampaikan 3 (tiga) rancangan tentang organisasi dan tata kerja yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Menteri PANRB.

Penataan Organisasi dan Tata Laksana Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), BPOM melakukan penataan tugas dan fungsi unit kerja melalui penambahan tugas pengujian kepada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan UPT Balai Besar/Balai POM untuk melaksanakan pemeriksaan uji COVID-19 melalui penetapan:

1. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.153 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan Balai POM di Gorontalo Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Uji *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.05.20.170 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Jayapura, dan Balai POM di Ambon Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Uji *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.06.20.206 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Balai Besar POM di Manado Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Uji *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.06.20.223 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Balai POM di Mamuju untuk melaksanakan Pemeriksaan Uji *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, BPOM melakukan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan BPOM akibat penyebaran COVID-19 melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.06.20.182 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.06.20.220 Tahun 2020. Sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan BPOM disosialisasikan Kepala BPOM secara daring kepada seluruh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPOM, Kepala UPT Balai Besar, Balai, dan Loka POM, serta seluruh pegawai BPOM tanggal 26 Juni 2020.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sehubungan dengan peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan RB, BPOM menetapkan 3 (tiga) kebijakan RB pada tahun 2020 yang dapat diunduh pada subsite rb.pom.go.id:

1. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM, yang mencabut Keputusan sebelumnya tahun 2019, sebagai pedoman pelaksanaan RB di unit kerja dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.152 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim RB BPOM, yang mencabut Keputusan sebelumnya tahun 2019, di antaranya memuat:
 - a. penyesuaian nomenklatur Pokja dan tugas Tim Pelaksana RB BPOM berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB;
 - b. perubahan komposisi susunan keanggotaan Tim Pelaksana RB BPOM Pokja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- c. penambahan ketentuan yang mengatur mengenai Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dan Monitoring dan Evaluasi RB pada unit organisasi eselon I.
3. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.06.20.207 Tahun 2020 tentang *Quick Wins* BPOM Tahun 2020, termasuk memuat Penyederhanaan Birokrasi BPOM sebagai *quick wins* wajib bagi instansi pemerintah pada tahun 2020 atau 2021.

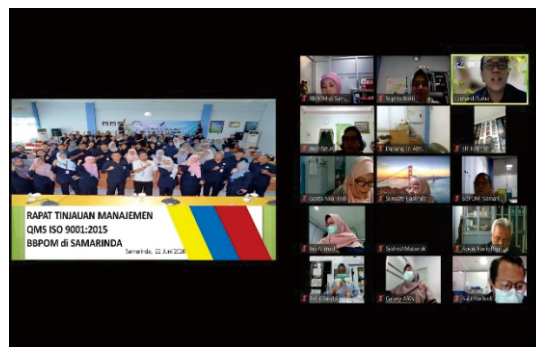
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB Pelaksanaan RB dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dan WBBM Tahun 2020, BPOM melaksanakan konsensus PMPRB tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2020 secara daring dan dihadiri oleh Kepala BPOM, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Tim Pengarah RB BPOM, Tim Pelaksana RB BPOM yang meliputi para Koordinator dan Anggota Pokja, serta Tim Asesor PMPRB dan Monev RB BPOM.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja di Lingkungan BPOM

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM. Sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PI.02.04.2.22.05.20.319 tentang Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Unit Kerja dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM maka kegiatan dilaksanakan sesuai persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.3. Management Review. RTM dilakukan melalui tatap muka langsung untuk personel yang work from office dan melalui daring bagi pegawai yang work from home masing-masing Unit Kerja.



Konsensus PMPRB BPOM Tahun 2020
tanggal 30 Juni 2020



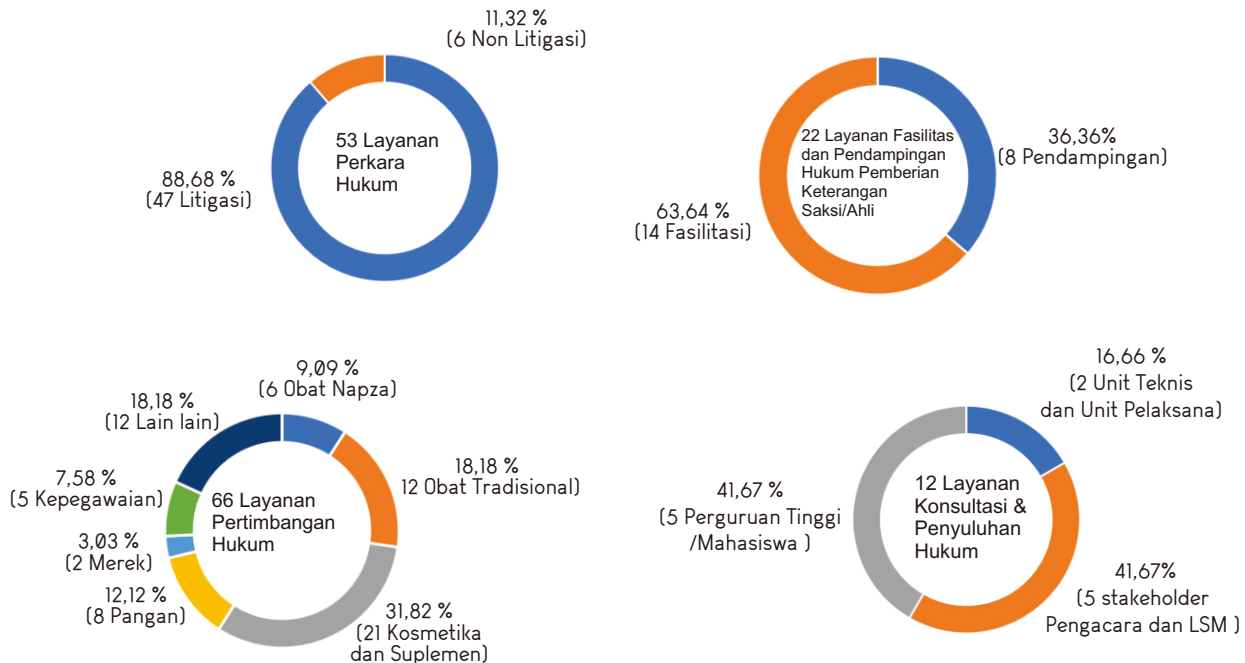
Rapat Tinjauan Manajemen Unit Kerja dan
UPT Balai Besar/Balai/Loka POM

VIII. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM diberikan oleh Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 153 layanan yang terdiri dari :



IX. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

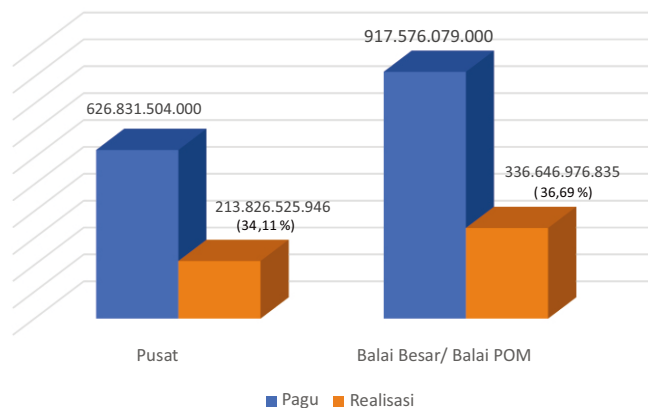
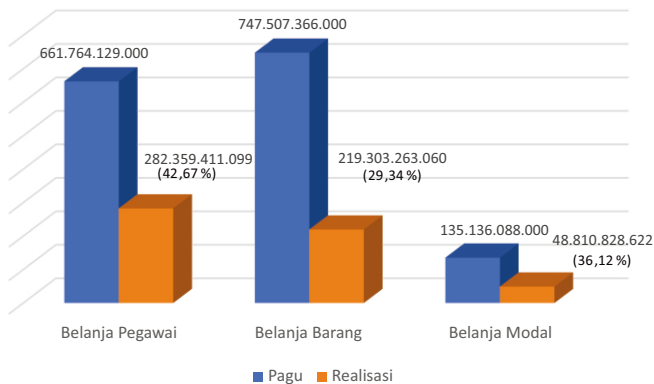
Kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan II 2020, adalah:

- a. Memfasilitasi *Video Conference* (VC) dengan Tim Representatif WHO di Jakarta untuk membahas peninjauan dukungan WHO kepada Badan POM, meningkatkan kolaborasi WHO-Badan POM serta menekankan pentingnya pelibatan peran Badan POM dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19. Dalam hal ini, WHO mencatat peran positif Badan POM dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan bersama Balitbangkes telah memberikan dukungan kepada Badan POM untuk *capacity building* berupa *virtual training* untuk pengujian COVID-19 menggunakan PCR dan *training biosafety*.
- b. Memfasilitasi kerja sama dengan *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia dalam penanganan COVID-19, antara lain telah dilakukan pelatihan Laboratorium melalui webinar dalam 2 (dua) tahap. Pelatihan dibuka oleh Ibu Kepala Badan POM dan pimpinan tertinggi TGA (Adj. Prof. John Skeritt).
- c. Pertemuan *World Health Assembly* (WHA) ke-73 yang dihadiri oleh Ibu Kepala Badan POM, yang membahas mengenai isu COVID-19 dan menekankan pentingnya langkah terpadu, sinergis dan komprehensif secara global dalam penanganan COVID-19. Pertemuan WHA-73 berhasil mensahkan resolusi terkait COVID-19 *Response*, yang memuat seruan kepada seluruh negara dan rekomendasi peningkatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap pandemi global, khususnya terkait respon COVID-19.
- d. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Vaksin Global secara virtual, antara lain membahas peluang dan tantangan dalam penyebaran virus COVID-19 perlu dilakukan upaya secara internasional bekerja sama untuk mempercepat akses terhadap vaksin COVID-19.
- e. Pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM dan untuk membahas akses produk farmasi dan alat Kesehatan dalam kerangka COVID-19, termasuk pembahasan akses Remdesivir Gilead.
- f. Pertemuan peninjauan kerja sama Vaksin COVID-19 PT. Bio Farma dengan CEPI (*Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*).
- g. Pertemuan virtual antara Sinovac Biotech Ltd. dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan Bio Farma dalam rangka mencapai kesepakatan kerja sama pengembangan dan penelitian vaksin COVID-19 antara Sinovac dan PT. Bio Farma, termasuk rencana uji klinik fase 3 di Indonesia.
- h. Pembahasan virtual dengan KBRI Tokyo-Jepang dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja dan *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA) Jepang terkait pemasukan Obat Avigan (Favipiravir) ke Indonesia.
- i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Dit. Asia Selatan dan Tengah dan KBRI New Delhi) dan Industri Farmasi dalam memfasilitasi pemasukan Bahan Baku Obat (BBO), termasuk BBO untuk penanganan COVID-19 dari India yang terkendala akibat adanya kebijakan pelarangan ekspor dan situasi *lockdown* di India. Selain itu juga dilakukan webinar terkait kerja sama Indonesia dan India pada sektor farmasi dan Kesehatan untuk menjajaki kerja sama dengan India terutama pada sektor farmasi terkait penelitian dan pengembangan bahan baku obat, termasuk bahan baku obat untuk penanganan COVID-19 guna mendorong investasi dan transfer teknologi India di bidang bahan baku obat tersebut.

- j. Biro Kerja Sama telah menerbitkan surat himbauan bantuan/donasi untuk masyarakat (*Community Service*) di bawah kerangka kerja sama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pengelolaan dan penyaluran bantuan CSR tersebut dikoordinasikan oleh Biro Umum dan SDM.
- k. Memfasilitasi beberapa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara:
 - 1. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PPPOMN, Badan POM tentang Pemeriksaan Laboratorium atas Spesimen COVID-19;
 - 2. Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Universitas Bengkulu dan Balai POM di Bengkulu tentang Kerja Sama Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) dalam Rangka Percepatan Deteksi COVID-19 di Provinsi Bengkulu.
- l. Memfasilitasi beberapa Kesepakatan Bersama antara:
 - 1. Badan POM dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Pemeriksaan Uji COVID-19 di Provinsi Gorontalo;
 - 2. Badan POM dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemeriksaan Uji COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- m. Memfasilitasi Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Universitas Gadjah Mada dan PT. Saka Farma Laboratories dan Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tentang Penelitian dan Pengembangan Kandidat *Immunomodulator* dari Produk Herbal dalam Penanganan COVID-19.

IX. Pengelolaan Anggaran

Setelah dilakukan revisi APBN-P tahun 2020, total anggaran BPOM menjadi sebesar Rp1.544.407.583.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp550.473.502.781,- (35,64%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp213.826.525.946,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp336.646.976.835,-



X. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2020. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2020-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	82,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional	74,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	81,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Kosmetik	74,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	77,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64,00	%	0,00	0,00
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80,80	%	87,83	108,70
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	78,00	%	80,71	103,47
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85,00	%	85,07	100,08
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	72,00	%	87,83	121,98
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	72,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87,20	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87,00	%	76,84	88,32

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	55,00	%	39,20	71,27
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85,00	%	96,97	114,08
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	52,00	%	50,38	96,88
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	60,00	%	64,58	107,63
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3,51	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71,00	nilai	91,12	128,34
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	660	Sekolah	Progres 13,71%	13,71
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	211	desa	Progres 15,35%	15,35
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	84	pasar	Progres 17,05%	17,05
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00	%	34,68	42,29
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	%	37,02	49,36
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	65,00	%	37,00	56,92
		Indeks RB UPT	81,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP UPT	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	70,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	nilai indeks	0,52	34,44
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	Nilai	51,83	55,73
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (92%)	%	95,00	103,26
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60,00	%	75,00	125,00
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80,00	%	100,00	125,00
		Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	33,00	%	Progres 25%	25,00
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83,00	%	73,34	88,36
		Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50,00	%	80,00	160,00
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60,00	%	10,00	16,67
		Indeks RB Direktorat Pengamanan	85,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	75,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengamanan yang optimal	1,51	nilai indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	Efisien (88%)	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75,00	%	91,67	122,23
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75,00	%	65,35	87,13
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75,00	%	87,50	116,67
		Persentase hasil patroli siber yang efektif	55,00	%	61,49	111,80
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2,00	jaringan	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	1,51	nilai indeks	0,25	16,56
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (88%)	%	90,00	102,27
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	77,00	%	59,57	77,36
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83,30	%	104,32	125,23
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	62,00	%	43,23	69,73
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	80,00	%	91,78	114,73
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73,00	%	69,34	94,99

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	72,00	%	83,09	115,40
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00	%	100,00	108,70
		Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90	Jumlah	58	64,44
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88,00	%	92,84	105,50
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,11	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	75,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	1,51	nilai indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Efisien (99%)	%	0,00	0,00
1.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	19,00	%	17,00	89,47
		Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	10,00	%	0,00	0,00
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	65,00	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	85,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	3,11	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang di selesaikan tepat waktu	80,00	%	100,00	125,00
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diselesaikan sesuai standar	85,00	%	85,00	100,00
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	85,00	%	22,00	25,88
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	45,00	%	39,00	86,67
		Persentase insiden/kasus keamanan pangan yang ditindaklanjuti	85,00	%	71,43	84,03
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Diberikan	81,00	%	84,90	104,81
		Persentase UPT yang memahami sistem Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	40,00	%	0,00	0,00
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang baik	Efisien (88%)	%	90,00	102,27

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	80,00	%	65,71	82,14
		Persentase UMKM Kosmetik yang Menerima Sertifikat CPKB	85,00	%	86,11	101,31
		Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	62,00	%	82,39	132,89
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	83,00	%	81,32	97,98
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	83,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	85,00	%	83,32	98,02
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	81,00	%	58,33	72,01
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	88,00	%	55,43	62,99
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	80,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	90,00	%	96,07	106,74
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan kosmetik	3,51	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah UMKM kosmetik yang di fasilitasi dalam pemenuhan CPKB	56	UMKM	48	85,71
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	Efisien (100%)	%	90,00	90,00
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	70,00	%	68,00	97,14
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Bidang Distribusi Obat	87,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80,00	%	82,91	103,64
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	65,00	%	83,10	127,85
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	78,00	%	82,68	106,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,51	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	90,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	75,00	indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Efisien (88%)	%	0,00	0,00
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	93,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	46,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16.300	permohonan	5271	32,34
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	96,38	137,69
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3,11	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70,00	%	73,91	105,58
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86,00	%	69,30	80,58
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.000	label dan iklan	31723	52,87
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	90,00	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Efisien (98%)	%	0,00	0,00
1.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	54,00	%	19,64	36,37
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar	50	Jumlah	10	20,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	65,00	%	0,00	0,00
		Persentase sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko rendah dan sedang yang dilakukan pendalam mutu, dan memenuhi ketentuan	50,00	%	56,36	112,72
		Persentase sampel pangan fortifikasi yang diambil dan memenuhi syarat	87,00	%	81,76	93,98
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	88,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan terpadu lintas sektor	5	Jumlah	10	200,00
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	45,00	%	0,00	0,00
		Persentase keputusan hasil pengawasan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan sesuai standar	93,00	%	100,00	107,53
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan PRRS	3,51	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana dan produk pangan risiko rendah dan sedang	89,00	%	100,00	112,36
		Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	100,00	105,26
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	Efisien (92%)	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	50,00	%	58,33	116,66
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84,00	%	36,89	43,92
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	90,00	%	55,56	61,73
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	72,00	%	95,00	131,94
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	85,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang memenuhi persyaratan CPOB	72,00	%	88,24	122,56
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	65,00	%	73,33	112,82
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,51	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat	60,00	%	35,00	58,33
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Efisien (95%)	%	0,00	0,00		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	80,00	%	84,96	106,20
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85,50	Indeks	0,00	0,00
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78,00	%	84,74	108,64
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	99,87	105,13
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,31	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	75,00	%	92,07	122,76
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	20,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	1,51	Indeks	0,75	49,67
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Efisien (95%)	%	75,00	78,95
		1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	70,00	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	82,00			Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	63,00	%	75,27	119,48
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	85,87	122,67
		Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	3,51	Indeks	0,00	0,00
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	78,00	%	80,00	102,56
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	Efisien (92%)	%	86,00	93,48
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85,00	%	82,45	97,00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratinik/Klinik dan DIP	79,00	Indeks	0,00	0,00
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68,00	%	76,51	112,51
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	78,88	112,69

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praliniik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72,00	%	84,63	117,54
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,51	Indeks	3,70	105,41
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	20,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praliniik/Klinik dan DIP yang efektif	75,00	%	78,13	104,17
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80,00	%	75,36	94,20
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	91,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	1,51	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (96%)	%	75,00	78,13
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	80,00	%	100,00	akhir tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	80,00	%	68,00	85,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada stakeholder yang efektif	85,00	%	0,00	0,00
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	97,96	115,25
		Indeks RB Unit Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Efisien (100%)	%	88,00	88,00
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	71,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	91,00	%	103,45	113,68
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88,00	%	55,00	62,50
		Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar	72,00	%	30,00	41,67
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	98,94	116,40
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	3,91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	1,51	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Efisien (100%)	%	75,00	75,00
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sesuai roadmap	80,00	%	80,00	100,00
		Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	84,00	%	75,58	89,98
		Persentase sosialisasi standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada stakeholder yang efektif	92,00	%	8,33	9,05
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Efisien (100%)	%	92,00	92,00
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	50,00	UMKM	0,00	0,00
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	30,00	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	80,00	%	0,00	0,00
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	80,00	Kab/Kota	0,00	30,00
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	80,00	%	0,00	0,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	84,00	Indeks	0,00	0,00
		Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9.000	Jumlah	9.543	106,03
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	150	Jumlah	0,00	0,00
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	70,00	nilai	0,00	0,00
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,11	Indeks	0,00	0,00
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100	Jumlah	73	73,00
		Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100,00	%	34,00	34,00
		Indeks RB Dit PMPU	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	1,51	Indeks	0,75	49,67
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	Efisien (90%)	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Nilai persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap standar Kemampuan Laboratorium	71,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	-	%	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	84,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	65,00	%	diukur pada TW III dan TW IV	diukur pada TW III dan TW IV
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	70,00	%	diukur pada TW III dan TW IV	diukur pada TW III dan TW IV
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	79,00	%	25,43	32,19
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91,00	%	99,38	109,21
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	43,00	%	7,17	16,67
		Indeks RB PPPOMN	91,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	80,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Status akreditasi	-	%	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51	Indeks	0,25	16,56
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,40	nilai	100,00	107,07
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (90%)	%	100,00	111,11		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan	50,00	%	24,11	48,22
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	70,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	70,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	45,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	50,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	50,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	75,00	Indeks	73,75	98,33
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien (88%)	%	0,00	0,00
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase perencanaan riset dan kajian sesuai rencana induk riset	71,00	%	75,00	105,63
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	70,00	%	95,00	135,71
		Persentase kenaikan hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke stakeholder BPOM	15,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	80,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	41,00	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	opini	WTP	100,00
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	73,25	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,50	Indeks	85,30	107,30
		Indeks Kepuasan Media	73,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	66,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kerjasama yang efektif	82,00	%	41,00	50,00
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9,35	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	7,75	nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja Inspektorat Utama	3,40	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditolerans	<1	%	0,00	0,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00	%	diukur pada TW III	diukur pada TW III
		2.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Presentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	72,00	%
Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2,00			kawasan	akhir tahun	akhir tahun
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	81,00			Indeks	akhir tahun	akhir tahun
Jumlah rekomendasi penguatan regulatori yang diterapkan oleh negara penerima KSS Badan POM	2			Dokumen	akhir tahun	akhir tahun
Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	81,00			%	akhir tahun	akhir tahun
Jumlah dokumen Kerja Sama Badan POM	84			Dokumen	31	36,90
Indeks RB Biro Kerja Sama	85,00			Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama	1,51	Indeks	0	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama	Efisien (90%)	%	0	0,00
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	4,90	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,25	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93,00	Nilai	23,48	25,25
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	94,24	Nilai	100	106,11
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standara Akuntansi Pemerintahan	100,00	%	50	50,00
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,79	Indeks	3,79	100,00
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	85,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	50	50,00
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward and punishment berdasarkan mekanisme reward and punishment	20,90	%	20,9	100,00
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	60	60,00
		Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	57,00	%	67,55	118,51
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100,00	%	60	60,00
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	80,00	%	0	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	50	50,00
		Persentase laporan PNBP unit kerja yang disampaikan tepat waktu	95,00	%	91	95,79
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	1,51	Indeks	0	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)	Nilai	90	90,00
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,40	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,40	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,20	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik internal Biro Hukum dan Organisasi	3,55	Indeks	3,82	107,61
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100,00	%	82,20	82,20
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	82,00	%	93,28	113,75
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	91,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	1,51	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Nilai	88,00	92,63

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,50	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan media	73,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks opini publik BPOM	66,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro HDSP	74,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	Indeks	99,75	100,16
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,00	%	99,48	100,48
		Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Biro HDSP	73,00	Indeks	93,43	127,99
		Persentase realisasi rencana aksi peningkatan kualitas layanan publik	100,00	%	0,00	0,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Biro Humas dan DSP	3,91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I	75,00	Nilai	83,33	111,11
		Indeks RB Biro HDSP	85,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro HDSP	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro HDSP yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro HDSP	Efisien (88%)	Nilai	86,00	97,73
2.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,22	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	74,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,71	Indeks	3,71	100,00
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85,00	%	99,98	117,62

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir	73,00	%	45,56	62,41
		Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar	75,00	%	40,00	53,33
		Persentase unit kerja yang mampu mengelola arsip dengan baik sesuai standar pengelolaan kearsipan	85,00	%	30,05	35,35
		Indeks RB Biro Umum dan SDM	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas SDM Biro Umum dan SDM	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum dan SDM yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Biro Umum dan SDM	Efisien (100%)	Nilai	75,00	75,00
2.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	75,00	%	65,33	87,11
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	770	SDM	80	10,39
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	3,90	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	40,00	%	57,00	142,50
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	10	Dokumen	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,35	Nilai	4,48	102,99
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	90,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	86,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB PPSDM POM	88,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	93,00	Nilai	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	Efisien (90%)	Nilai	0,00	0,00
2.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	3,80	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	Baseline	%	10,53	10,53
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,80	%	3,01	107,50
		Nilai RB Badan POM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	4,63	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100,00	%	98,12	98,12
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	15,00	%	Progres 5%	5,00
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35,00	%	10,00	28,57
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100,00	%	93,75	93,75
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100,00	%	28,09	28,09
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	Baseline		9,59	9,59

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Sertifikasi ISO 27001	1	Dokumen	Progres 25%	25,00
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93,00	Nilai	75,00	80,65
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Efisien (88%)	Nilai	60,94	69,25
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	9,35	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat I	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	75,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	<1	%	0,00	0,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00	%	diukur pada TW III	diukur pada TW III
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	82,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100,00	%	38,89	38,89
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat I yang sesuai standar	75,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90,00	%	89,08	98,98
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti dengan tuntas	80,00	%	40,00	50,00
		Indeks RB Inspektorat I	91,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	75,00	Indeks	72,98	97,31
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	Efisien (88%)	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.9	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	9,35	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	81,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	<1	%	diukur pada TW III	diukur pada TW III
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	82,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	80,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100,00	%	8,00	8,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	75,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	90,00	%	78,09	86,76
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	80,00	%	50,00	62,50
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100,00	%	0,00	0,00
		Persentase rekomendasi hasil reuiv PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	88,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Inspektorat II	91,00	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,40	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	75,00	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (88%)	%	0,00	0,00		

LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 30 Juni 2020)

A. Unit Pusat

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	330.137.708.000	110.822.220.686	33,57%
	3158 BIRO KERJASAMA	4.791.449.000	793.593.642	16,56%
	3159 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	15.270.354.000	4.369.130.860	28,61%
	4110 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	7.974.034.000	2.046.649.331	25,67%
	4111 BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	16.111.058.000	3.019.574.249	18,74%
	4112 BIRO UMUM DAN SDM	285.990.813.000	100.593.272.604	35,17%
2	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	35.869.588.000	8.572.890.639	23,90%
	4122 DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.626.503.000	2.147.594.402	28,16%
	4123 DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.101.551.000	1.141.748.143	16,08%
	4125 DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	6.599.298.000	1.444.901.875	21,89%
	4127 DIT. REGISTRASI OBAT	7.614.050.000	1.473.255.898	19,35%
	4131 DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	6.928.186.000	2.365.390.321	34,14%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	28.296.984.000	7.246.292.522	25,61%
	4119 DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	9.286.165.000	3.020.391.955	32,53%
	4121 DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	7.063.991.000	1.356.373.027	19,20%
	4128 DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	7.539.900.000	1.449.439.904	19,22%
	4129 DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	4.406.928.000	1.420.087.636	32,22%
4	445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	37.857.088.000	5.385.183.412	14,23%
	4120 DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	6.291.542.000	593.304.718	9,43%
	4124 DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	8.719.090.000	939.931.952	10,78%
	4126 DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	7.359.571.000	1.077.408.885	14,64%
	4130 DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	6.613.174.000	1.304.710.292	19,73%
	4132 DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	8.873.711.000	1.469.827.565	16,56%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	15.512.993.000	5.623.294.810	36,25%
	4117 DIT. PENGAMANAN	4.850.511.000	1.446.119.789	29,81%
	4118 DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	5.428.707.000	2.941.276.511	54,18%
	4134 DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	5.233.775.000	1.235.898.510	23,61%
6	INSPEKTORAT UTAMA	16.110.999.000	6.375.426.694	39,57%
	4115 INSPEKTORAT I	13.170.745.000	5.734.466.179	43,54%
	4116 INSPEKTORAT II	2.940.254.000	640.960.515	21,80%
7	4133 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	60.706.414.000	25.141.922.545	41,42%
8	4135 PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	18.245.125.000	4.685.559.093	25,68%
9	4114 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	47.731.519.000	28.870.789.060	60,49%
10	4113 PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	36.363.086.000	11.102.946.485	30,53%
TOTAL SATKER PUSAT		626.831.504.000	213.826.525.946	34,11%

B. Balai Besar / Balai POM

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	32.626.736.000	12.947.572.894	39,68%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	47.101.471.000	16.717.670.727	35,49%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	47.311.819.000	17.396.007.196	36,77%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	32.257.207.000	11.771.453.176	36,49%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	48.786.352.000	16.498.110.237	33,82%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	31.183.552.000	9.770.569.612	31,33%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	36.839.885.000	12.506.433.345	33,95%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	38.496.037.000	13.952.312.550	36,24%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	33.658.631.000	12.574.090.658	37,36%
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	25.447.679.000	8.043.660.992	31,61%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	28.922.452.000	10.670.135.686	36,89%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	23.759.218.000	8.987.273.755	37,83%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	25.032.475.000	8.623.398.881	34,45%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	23.688.803.000	7.101.496.421	29,98%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	26.704.835.000	10.886.136.640	40,76%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	26.316.331.000	10.490.260.899	39,86%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	31.844.852.000	10.769.871.558	33,82%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	21.111.850.000	8.161.000.916	38,66%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	44.216.042.000	15.758.182.988	35,64%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	20.249.980.000	8.139.804.345	40,20%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	18.700.448.000	7.797.235.275	41,70%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	31.487.620.000	14.728.752.742	46,78%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	26.590.742.000	13.665.316.976	51,39%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	26.829.797.000	8.307.303.449	30,96%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	28.649.087.000	9.869.263.315	34,45%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	21.587.374.000	7.556.380.072	35,00%

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	26.028.465.000	9.629.340.965	37,00%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	20.444.169.000	7.566.768.196	37,01%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	16.445.716.000	6.038.901.956	36,72%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	14.054.952.000	4.931.202.176	35,09%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	15.753.844.000	5.543.302.779	35,19%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	10.723.420.000	5.779.637.185	53,90%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	14.724.238.000	3.468.128.273	23,55%
TOTAL SATKER DAERAH		917.576.079.000	336.646.976.835	36,69%
TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH		1.544.407.583.000	550.473.502.781	35,64%



BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2020



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI